



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional yang dilakukan secara baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah, serta kondisi terkini perangkat daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;

- 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
- 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 32

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Imogiri. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	60,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	60,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	event					#DIV/0!	#DIV/0!	Angkas di bulan Agustus
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	event	100	60,000,000	0	-	0.00%	0.00%	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
4.01.04.5.01	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	40,000,000	-	-	0.00%	0.00%	Tahap Salur Dais yang mundur
4.01.04.5.01.0007	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di Kapanewon	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	100	40,000,000	0	-	0.00%	0.00%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	82	3,913,196,074	82	902,418,899	100.00%	23.06%	
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	5,100,000	100	1,275,000	100.00%	25.00%	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2,550,000	1	850,000	14.29%	33.33%	Anggaran kasnya sudah di tentukan dari Bidang Anggaran
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2,550,000	0	425,000	0.00%	16.67%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	3,387,712,126	100	755,364,352	100.00%	22.30%	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	3,338,277,126	20	743,324,352	100.00%	22.27%	
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembayaran TPP	Kali					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	44,760,000	1	11,190,000	25.00%	25.00%	
		Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	orang					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	22	4,675,000	2	850,000	9.09%	18.18%	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	1,500,000	100	750,000	100.00%	50.00%	
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1,500,000	0	750,000	0.00%	50.00%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	98	124,629,128	98	23,065,660	100.00%	18.51%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,658,750	4	3,658,750	100.00%	100.00%	
		Komponen Instalasi Listrik	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	27,051,890	4	6,984,910	100.00%	25.82%	Tambah Daya menunggu surat rekomendasi dari PLN dan Pembayaran rekening Sesuai Tagihan disetiap bulannya
		Alat Tulis Kantor	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	3,735,000	2	2,122,500	100.00%	56.83%	
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	8,415,488	3	1,712,000	25.00%	20.34%	
		Barang Cetak	lembar					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penggandaan	lembar					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	2,400,000	3	600,000	100.00%	25.00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	58	75,118,000	7	6,175,000	12.07%	8.22%	
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah						#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2,125,000	0	750,000	0.00%	35.29%	
		Laporan Penataan Arsip	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2,125,000	0	1,062,500	0.00%	50.00%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	98	-	-	-	0.00%	#DIV/0!	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	0	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	jenis	0	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	209,166,052	100	44,657,619	100.00%	21.35%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	38,500,000	3	1,748,624	25.00%	4.54%	
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	18,870,000	3	5,860,000	25.00%	31.05%	
		Jasa Pengambilan Sampah	bulan					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	151,796,052	6	37,048,995	100.00%	24.41%	
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kantor						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Dokumen BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	bulan					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	98	185,088,768	98	77,306,268	100.00%	41.77%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	148,465,000	7	40,682,500	100.00%	27.40%	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	36,623,768	8	36,623,768	100.00%	100.00%	
		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	unit					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	31,675,000	100	4,775,000	100.00%	15.07%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	23,850,000	100	2,500,000	100.00%	10.48%	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	7,500,000	1	2,500,000	25.00%	33.33%	
		Laporan Koordinasi Forkompimkap	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	6	16,350,000	0	-	0.00%	0.00%	
		Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	100	7,825,000	100	2,275,000	100.00%	29.07%	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	7,825,000	0	2,275,000	0.00%	29.07%	
		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Masyarakat yang dilayani	orang					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Jenis Layanan yang diberikan	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	147,025,000	100	44,115,000	100.00%	30.01%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	100	106,965,000	100	44,115,000	100.00%	41.24%	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	23,990,000	8	18,140,000	100.00%	75.61%	
		Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pengembangan Partisipatif	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Monev Bantuan Padukuhan	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	82,975,000	1	25,975,000	20.00%	31.30%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Bidang Sosial	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	40,060,000	98	-	98.00%	0.00%	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	40,060,000	0	-	0.00%	0.00%	
		Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	98	172,400,000	98	3,150,000	100.00%	1.83%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	98	172,400,000	98	3,150,000	100.00%	1.83%	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	172,400,000	0	3,150,000	0.00%	1.83%	
		Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	8,500,000	100	-	100.00%	0.00%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	8,500,000	100	-	100.00%	0.00%	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	240	8,500,000	0	-	0.00%	0.00%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Di Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tidak sesuai dengan Perencanaan yang sudah di tentukan angkasnya di karenakan tahap salur dari Paniradya mundur.
- b. Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik tidak sesuai dengan Perencanaan yang sudah di tentukan angkas setiap bulan di karenakan Pembayaran rekening tersebut berdasarkan tagihan setiap bulannya dan untuk tambah daya masih menunggu surat rekomendasi dari PLN

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KETATALAKSANAAN																		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	40,000,000.00	40,000,000.00	39,500,000.00	-500,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		66,040,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	39,500,000.00	-500,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/ Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			66,040,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3,696,412,718.00	4,272,796,074.00	4,226,835,040.00	530,422,322.00							4,733,032,644.00	
	7.01	KECAMATAN							3,696,412,718.00	4,272,796,074.00	4,226,835,040.00	530,422,322.00							4,733,032,644.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 angka	82 angka	3,378,562,718.00	3,913,196,074.00	3,897,215,040.00	494,469,926.00							3,873,032,644.00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 persen	100 persen	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		3,825,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2,550,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1,275,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	2,836,753,770.00	3,387,712,126.00	3,387,712,126.00	550,958,356.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		2,708,522,644.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,786,893,770.00	3,338,277,126.00	3,338,277,126.00	551,383,356.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2,647,322,644.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	44,760,000.00	44,760,000.00	44,760,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			51,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5,100,000.00	4,675,000.00	4,675,000.00	-425,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10,200,000.00	KAPANEWON IMOGIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Kepegawaian				100 %	100 %	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		3,400,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			3,400,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				98 persen	98 persen	146,252,440.00	124,629,128.00	122,248,094.00	-24,004,346.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		335,485,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,658,750.00	3,658,750.00	3,658,750.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			15,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27,051,890.00	27,051,890.00	37,310,840.00	10,258,950.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			21,361,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,738,000.00	3,735,000.00	3,735,000.00	-3,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12,774,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,535,800.00	8,415,488.00	5,197,504.00	-2,338,296.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			18,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	58 Laporan	97,618,000.00	75,118,000.00	65,696,000.00	-31,922,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			250,225,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2,125,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	203,867,740.00	209,166,052.00	195,566,052.00	-8,301,688.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapa newon		176,800,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38,500,000.00	38,500,000.00	28,500,000.00	-10,000,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,870,000.00	18,870,000.00	18,870,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4,800,000.00	KAPANEWON IMOGIRI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon				100 persen	100 persen	23,850,000.00	23,850,000.00	23,850,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		120,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	16,350,000.00	16,350,000.00	16,350,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon				100 persen	100 persen	7,825,000.00	7,825,000.00	7,825,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		35,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	7,825,000.00	7,825,000.00	7,825,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			35,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				98 persen	98 persen	157,725,000.00	147,025,000.00	141,625,000.00	232,275,000.00							390,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 persen	100 persen	111,865,000.00	106,965,000.00	106,965,000.00	-4,900,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		240,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	23,140,000.00	23,990,000.00	23,990,000.00	850,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			90,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	88,725,000.00	82,975,000.00	82,975,000.00	-5,750,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			150,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05. 2.01	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum				100 %	100 %	8,500,000.00	8,500,000.00	5,700,000.00	-2,800,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		110,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.05. 2.01.000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				240 Orang	240 Orang	8,500,000.00	8,500,000.00	5,700,000.00	-2,800,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			110,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	J U M L A H								3,836,412,718.00	4,412,796,074.00	4,296,335,040.00	459,922,322.00							4,974,072,644.00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



Siamet Santosa, SIP., M.M
NIP. 19731226199601001